

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang Wilayah Pesisir Barat Pulau Sumatera. Kota Padang memiliki kondisi geografis dan morfologi wilayah yang kompleks. Secara geografis, wilayah Kota Padang terletak dekat dengan pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Selain itu, Kota Padang berada pada jalur patahan Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko. Berdasarkan morfologi wilayah, Kota Padang memiliki keragaman kondisi wilayah yang sebagian besar berupa pesisir pantai, dataran rendah hingga wilayah perbukitan (Rencana Penanggulangan Bencana Kota Padang, 2014-2018).



**Gambar 1.1** Peta Pola Ruang Kota Padang  
Sumber : RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

Berdasarkan Kebijakan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030, Kota Padang berada di kawasan yang rawan bencana alam, seperti bencana longsor, gempa bumi, tsunami, banjir dan bencana liquifaksi. **Gambar 1.1** menunjukkan Kota Padang terletak di wilayah pesisir pantai. Kondisi ini tentu menyebabkan Kota Padang sangat rentan terhadap ancaman bencana salah satunya adalah gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami (Rencana Penanggulangan Bencana Kota Padang, 2014-2018). Pasca gempa dan tsunami

Aceh pada 25 Desember 2004, kekhawatiran masyarakat akan terjadi gempa dan tsunami di Wilayah Pantai Barat Kota Padang semakin meningkat. Dalam 10 tahun terakhir, di Kota Padang telah terjadi beberapa kejadian bencana alam yang menelan korban jiwa dan kerugian harta, salah satunya adalah bencana gempa bumi pada tahun 2009.

Gempa bumi yang terjadi pada akhir tahun 2009, menimbulkan tiga dampak sekaligus yang dirasakan oleh Kota Padang seperti dampak primer, sekunder dan dampak tersier. Dampak primer adalah dampak yang mengakibatkan skala besar berupa patahan di permukaan bumi seperti retakan di jalan raya, sedangkan dampak sekunder adalah dampak yang ditimbulkan berupa kebakaran. Selain itu, gempa bumi pada tahun 2009 juga menimbulkan dampak tersier yaitu dampak yang mengakibatkan kehilangan korban jiwa, timbulnya wabah penyakit, kehilangan mata pencaharian, kerusakan lingkungan dan kerusakan beberapa bangunan dan infrastruktur seperti perkantoran, pasar, fasilitas pendidikan, peribadatan dan sebagainya. Data menyebutkan bahwa terjadi kerusakan pada 442 unit kantor pemerintah, 448 unit fasilitas pendidikan, 153 unit fasilitas kesehatan, 68 unit jembatan dan 2.851 unit tempat ibadah. Kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi telah diperkirakan mencapai 20,86 triliun (BPBD Kota Padang, Oktober 2009). **Gambar 1.2** menunjukkan salah satu kerusakan kantor pemerintahan di Kota Padang pasca gempa bumi. Ketiga dampak yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi menjadi beban bagi Kota Padang sehingga dapat berpengaruh pada struktur ruang kota.



**Gambar 1.2** Kerusakan Sarana Pemerintahan Akibat Gempa Bumi  
Sumber : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ Padang\\_earthquake.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/Padang_earthquake.jpg) (Diakses 14 Mei 2014)

Sebagai daerah yang rawan bencana, pasca gempa bumi pada tahun 2009 berbagai langkah aktif telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mensosialisasikan Wilayah Pantai Barat Kota Padang yang rentan dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Langkah aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dituangkan dalam rencana

mitigasi fisik dan rencana mitigasi non fisik. Rencana mitigasi fisik yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, seperti pembangunan gedung penyelamatan diri (*escape building*), perbaikan struktural fasilitas pemerintahan dan fasum serta pengadaan sarana dan prasarana penanganan darurat bencana. Rencana mitigasi non fisik seperti simulasi, diseminasi peta rawan tsunami, peta jalur evakuasi, penyusunan rencana tata ruang, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan penetapan SNI bangunan tahan gempa (Rencana Penanggulangan Bencana Kota Padang, 2014-2018).

Pasca bencana gempa bumi pada tahun 2009, Pemerintah Kota Padang mensosialisasikan upaya pengurangan risiko bencana melalui diseminasi kebencanaan gempa bumi dan tsunami. Diseminasi tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang. Meningkatnya kesadaran masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang akan potensi bencana tsunami, mengakibatkan sebanyak 50% masyarakat pesisir berkeinginan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami (Niken, *et.al.*, 2010). Keinginan masyarakat pesisir untuk berpindah juga didorong oleh adanya rencana pemerintah untuk memindahkan beberapa fasilitas penting seperti perkantoran ke daerah yang aman dari bencana tsunami (Prasetio, *et. al.*, 2012). Perubahan lokasi bermukim di Wilayah Pantai Barat Kota Padang juga disebabkan oleh adanya ketidaktepatan proses diseminasi peta rawan tsunami (Rachmawati, *et.al.* 2013). Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat mengalami trauma dan menginginkan untuk pindah sehingga banyak rumah yang dijual di zona rawan tsunami.

Adanya keinginan pindah masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang berpotensi merubah salah satunya rencana struktur ruang Kota Padang seperti yang tertuang pada RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Perubahan struktur ruang yang diakibatkan oleh keinginan pindah dapat menyebabkan invensiensi pelayanan sarana dan prasarana Kota Padang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana perubahan orientasi bermukim masyarakat pasca bencana gempa bumi tahun 2009 serta melihat pengaruh orientasi bermukim terhadap struktur ruang Kota Padang yang tertuang dalam RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada uraian latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian “*Perubahan Orientasi Bermukim dan Struktur Ruang Kota Padang Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009*” sebagai berikut.

1. Kekhawatiran masyarakat akan terjadi gempa dan tsunami di Wilayah Pantai Barat Kota Padang semakin meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu tsunami menyebabkan tingginya keinginan masyarakat untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami sebesar 50% (Niken, et.all, 2010).
2. Ketidaktepatan proses diseminasi peta rawan tsunami yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Padang menimbulkan trauma dan keinginan pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami (Rachmawati, *et. al.*, 2013).
3. Perpindahan penduduk yang tidak terkendali sebagai dampak peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana tsunami dapat menimbulkan masalah dikemudian hari seperti penyediaan sarana dan prasarana perkotaan menjadi tidak efektif (Rachmawati, *et. al.*, 2013).
4. Pengembangan Kota Padang sebagai daerah pesisir dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) masih banyak yang belum didukung sarana dan prasarana yang tahan terhadap gempa dan tsunami (Bakin News, 2010).
5. Gempa bumi pada tahun 2009 menyebabkan kerusakan pada sarana, prasarana serta permukiman yang cukup besar hingga mencapai 20,86 triliun (BPBD Kota Padang, Oktober 2009) sehingga berpengaruh terhadap struktur ruang Kota Padang. Sebanyak 60% gedung kantor pemerintahan rusak berat akibat gempa pada 30 September 2009.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana orientasi bermukim masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang pasca bencana gempa bumi tahun 2009 ?
2. Bagaimana perubahan orientasi bermukim masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang terhadap struktur ruang RTRW Kota Padang ?

#### 1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian "*Perubahan Orientasi Bermukim dan Struktur Ruang Kota Padang Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009*" adalah:

1. Mengetahui keterkaitan pemahaman masyarakat mengenai diseminasi peta rawan tsunami terhadap orientasi bermukim masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang
  - a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai diseminasi peta rawan tsunami yang diberikan Pemerintah Kota Padang.
  - b. Mengetahui orientasi bermukim masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang pasca bencana gempa bumi tahun 2009.
2. Mengidentifikasi perubahan orientasi bermukim pasca bencana gempa bumi tahun 2009 terhadap struktur ruang Kota Padang

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian "*Perubahan Orientasi Bermukim dan Struktur Ruang Kota Padang Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009*" diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait antara lain:

1. Bagi pemerintah, yaitu sebagai acuan untuk kedepannya dalam pemberian informasi mengenai peta rawan tsunami secara jelas dan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan lokasi bermukim dan struktur ruang yang tanggap terhadap bencana.
2. Bagi akademisi, yaitu sebagai masukan untuk konsep pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana dan lokasi permukiman baru.
3. Bagi peneliti yaitu dapat mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, khususnya tentang perubahan orientasi bermukim masyarakat dan struktur ruang yang tanggap bencana.
4. Bagi pelaku bisnis, menjadi bahan pertimbangan dalam membuka lahan permukiman baru dan investasi bagi masyarakat di daerah timur dan utara Kota Padang sekaligus menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.

## 1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian terbagi atas ruang lingkup materi, batasan masalah, dan ruang lingkup wilayah.

### 1.6.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam pelaksanaan penelitian diperuntukan sebagai batasan materi yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk tujuan pertama, dibahas mengenai identifikasi peruntukan lahan tahun 2008 (sebelum gempa) dan tahun 2014 (setelah gempa), identifikasi karakteristik potensi bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang serta karakteristik masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang. Tahap kedua dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan orientasi bermukim masyarakat diantaranya:
  - a. Faktor internal, berasal dari kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat, seperti usia, pekerjaan, pendidikan, struktur keluarga, status rumah.
  - b. Faktor eksternal, terdiri aksesibilitas dan sarana prasarana.

Kedua faktor tersebut akan diidentifikasi pada survei primer dengan teknik penyebaran kuisioner dan dianalisis dengan analisis tabulasi silang, uji *chi-square* dan analisis korespondensi untuk melihat hubungan/ keterkaitan antara masing-masing faktor dengan keinginan pindah.

2. Untuk tujuan kedua akan dibahas mengenai struktur ruang Kota Padang berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Selanjutnya kebijakan RTRW tersebut akan dikaitkan dengan perubahan orientasi bermukim masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang.

### 1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah

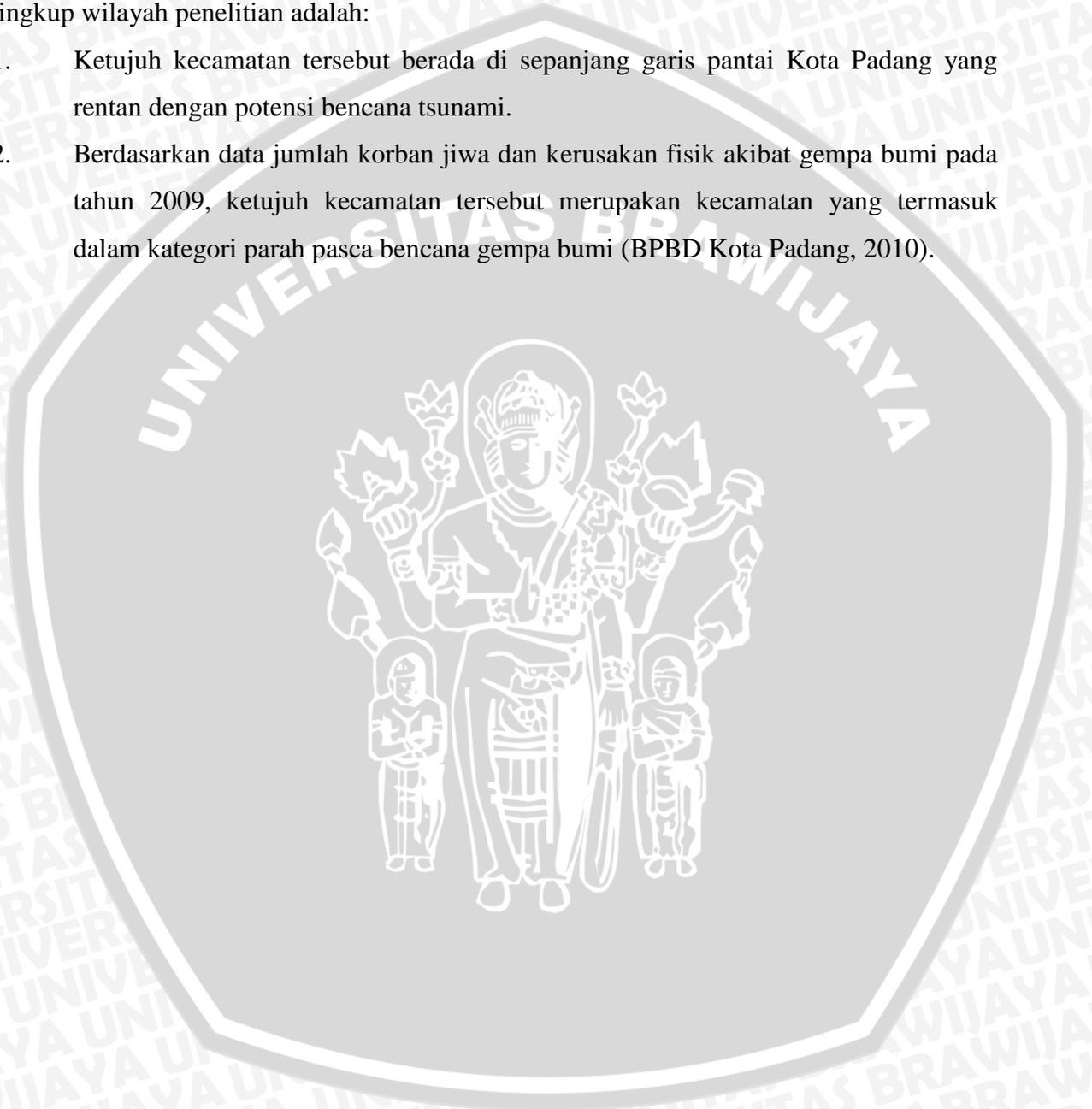
Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di pesisir pantai bagian Barat Sumatera Barat dengan luas keseluruhan adalah 694,96 km<sup>2</sup>, terletak pada 100°05'05"BT - 100°34'09"BT dan 00°44'00"LS - 01°08'35"LS. Kota Padang memiliki administrasi sebagai berikut.

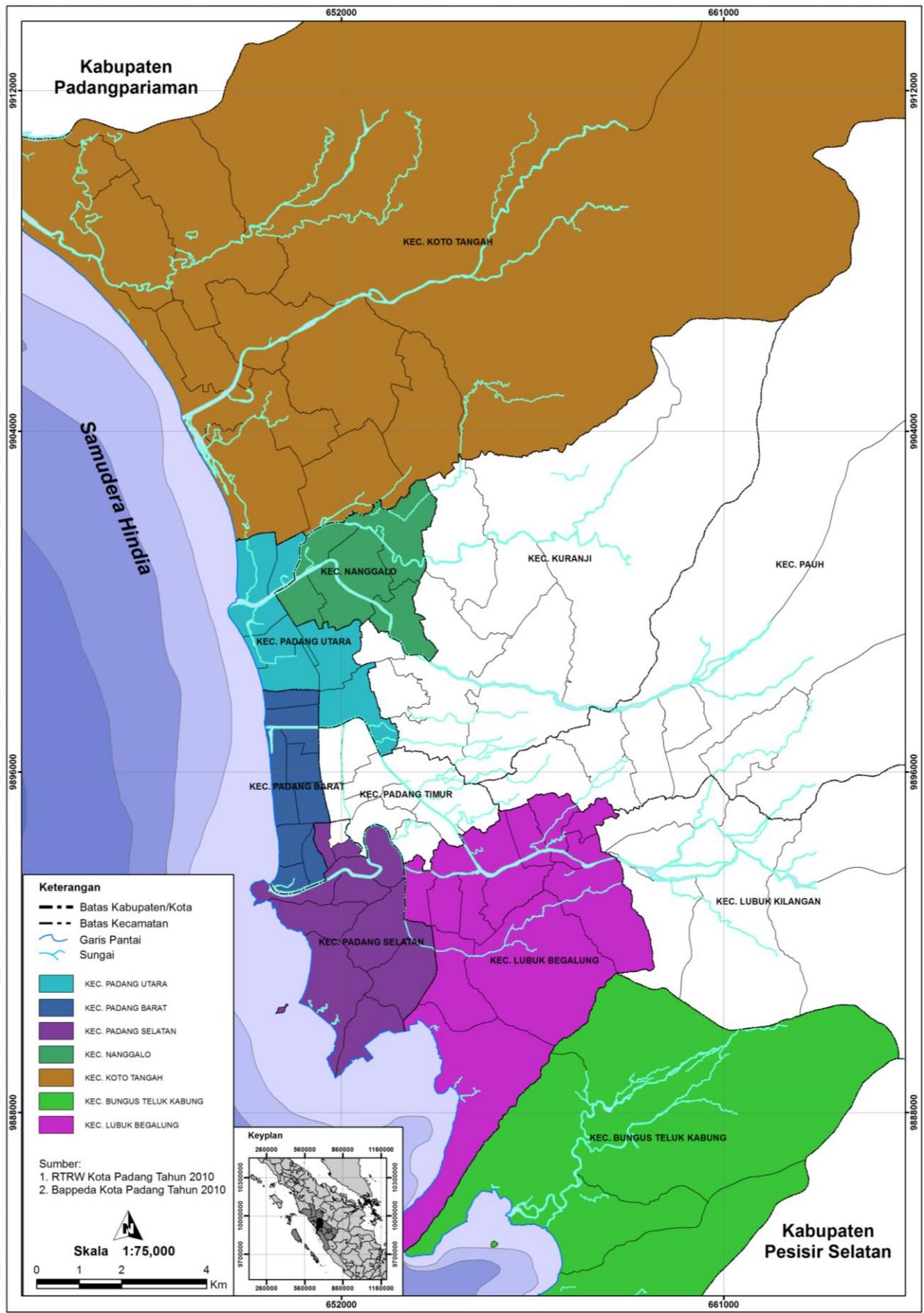
- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Barat : Selat Mentawai

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tangah, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Padang Barat, Padang Timur, Pauh, Padang Selatan, Lubuk

Begalung, Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. **Gambar 1.3** menunjukkan ruang lingkup wilayah penelitian yang akan dikaji berada pada kecamatan-kecamatan di Wilayah Pantai Barat Kota Padang diantaranya adalah Kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Nanggalo, Koto Tengah, Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Begalung. Adapun pemilihan ketujuh kecamatan tersebut sebagai lingkup wilayah penelitian adalah:

1. Ketujuh kecamatan tersebut berada di sepanjang garis pantai Kota Padang yang rentan dengan potensi bencana tsunami.
2. Berdasarkan data jumlah korban jiwa dan kerusakan fisik akibat gempa bumi pada tahun 2009, ketujuh kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang termasuk dalam kategori parah pasca bencana gempa bumi (BPBD Kota Padang, 2010).





Gambar 1.3 Peta Wilayah Studi

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan dalam penelitian berisi tentang latar belakang dan identifikasi permasalahan yang terjadi di Kota Padang terkait orientasi bermukim dan struktur ruang Kota Padang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup wilayah dan materi, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka berisi tentang kumpulan teori potensi bencana gempa dan tsunami, pengurangan risiko bencana, faktor yang mempengaruhi orientasi bermukim dan teori struktur ruang kota yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu juga digunakan kebijakan yang mengatur RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030.

### **BAB III Metode Penelitian**

Metode penelitian berisi mengenai alur yang digunakan dalam penelitian meliputi pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Selain itu membahas kerangka analisis terkait hubungan antara metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan *output* yang dihasilkan dari penelitian yaitu lokasi bermukim dan arahan struktur ruang yang tanggap bencana.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

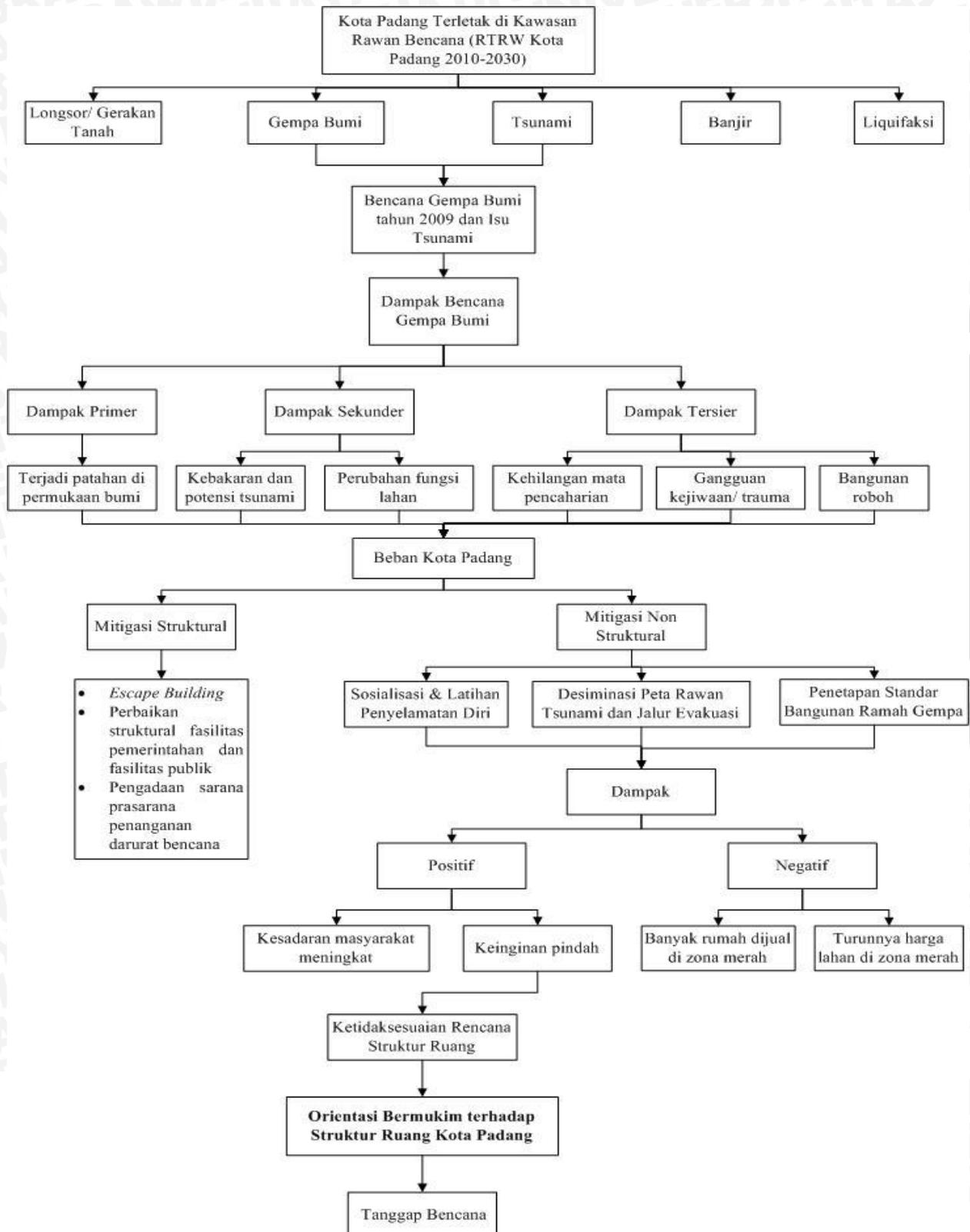
Hasil dan pembahasan berisi tentang penjabaran kondisi eksisting di wilayah studi yang selanjutnya dilakukan analisis tabulasi silang, uji *chi-square* dan analisis korespondensi. Analisis tabulasi silang dan uji *chi-square* digunakan untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara faktor internal dan eksternal terhadap keinginan pindah dalam bentuk tabel kontijensi. Sementara itu analisis korespondensi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan tersebut dalam bentuk grafik. Analisis teknik *overlay* digunakan untuk melihat perubahan orientasi bermukim terhadap struktur ruang Kota Padang dan potensi bencana.

### **BAB V Penutup**

Penutup berisi tentang kesimpulan dari BAB IV dan rekomendasi studi lanjutan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan lokasi permukiman baru yang aman dari potensi bencana Kota Padang.

## 1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. **Gambar 1.5** menunjukkan kerangka pemikiran penelitian yang dibuat berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang penelitian.



**Gambar 1.5** Kerangka Pemikiran